

ANALISIS PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN GENDER KOTA SEMARANG 2023



<https://semarangkota.bps.go.id>



ANALISIS PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN GENDER KOTA SEMARANG 2023

**ANALISIS PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN GENDER
KOTA SEMARANG
2023**

Katalog BPS : 2104028.3374

Nomor Publikasi : 33740.24010

Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm

Jumlah Halaman : xiv + 61 halaman

Penyusun Naskah:

BPS KOTA SEMARANG

Pembuat Kover:

BPS KOTA SEMARANG

Penerbit:

©BPS KOTA SEMARANG

Sumber Ilustrasi:

www.canva.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang.

TIM PENYUSUN
ANALISIS PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN GENDER
KOTA SEMARANG
2023

Pengarah:

Fachruddin Tri Ubajani

Penanggungjawab:

Muhamad Yamani

Penyunting:

Harniaty

Pengolah Data dan Penulis:

Siti Khotimatus Sa'adah Mawar Sari

Penata Letak:

Siti Khotimatus Sa'adah Mawar Sari

Infografis dan Gambar Kulit:

Siti Khotimatus Sa'adah Mawar Sari

KATA PENGANTAR

Indikator yang digunakan untuk melihat capaian pembangunan manusia, khususnya melihat kesenjangan dan akses perempuan dalam pembangunan antara lain berupa Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Kedua indikator gender tersebut dapat digunakan sebagai alat monitoring hasil pembangunan berbasis gender.

Penyajian angka IPG dan IDG secara periodik menurut wilayah memungkinkan setiap wilayah mengetahui peta pembangunan manusia berbasis gender di daerahnya, baik berupa pencapaian, kecepatan, posisi, maupun disparitas antar daerah.

Kepada semua pihak yang telah membantu hingga terwujudnya publikasi ini diucapkan banyak terima kasih. Kritik dan saran dari konsumen data sangat kami harapkan demi kesempurnaan publikasi yang akan datang. Akhirnya kami berharap bahwa buku ini bermanfaat sebagai salah satu acuan dalam menentukan skala prioritas perencanaan program – program pembangunan.

Semarang, Juni 2023

BADAN PUSAT STATISTIK

KOTA SEMARANG

KEPALA,



Fachruddin Tri Ubajani S.Si, M.Si

DAFTAR ISI

	halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
Ringkasan Eksekutif	xiii
INFOGRAFIS	1
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Tujuan	8
1.3 Ruang Lingkup dan Sumber Data	9
BAB II METODOLOGI	11
2.1 Konsep Pembangunan Gender	13
2.2 Pengukuran Indeks Pembangunan Gender	15
2.3 Perubahan Interpretasi	17
2.4 Konsep Pemberdayaan Gender	18
BAB III GAMBARAN UMUM GENDER DI KOTA SEMARANG	21
3.1 Kependudukan	23
3.2 Kesehatan	25
3.3 Pendidikan	28
3.4 Ketenagakerjaan	29
BAB IV PEMBANGUNAN GENDER DI KOTA SEMARANG	33
4.1 Capaian Pembangunan Gender Kota Semarang	35
4.2 Perkembangan Komponen Penyusun IPM Kota Semarang	36

4.3	Disparitas IPM dan IPG Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	41
4.4	Perbandingan Regional Pembangunan Gender Ibukota Provinsi di Pulau Jawa	42
BAB V	PEMBERDAYAAN GENDER DI KOTA SEMARANG	45
5.1	Capaian Pemberdayaan Gender Kota Semarang	47
5.2	Perkembangan Komponen Penyusun IDG Kota Semarang	48
5.3	Disparitas IDG Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	50
5.4	Perbandingan Regional Pemberdayaan Gender Ibukota Provinsi di Pulau Jawa	51
BAB VI	KESIMPULAN	53
	DAFTAR PUSTAKA	57

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 2.2.1 Batas Minimum dan Maksimum Indikator IPG	16
Tabel 2.4.1 Dimensi dan Indikator Pembentukan IDG	19
Tabel 3.2.1 Angka Kesakitan menurut Jenis Kelamin di Kota Semarang, 2021-2023	26
Tabel 4.3.1 IPM dan IPG menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2023.....	41

<https://semarangkota.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 1	Rasio Jenis Kelamin menurut Kelompok Umur Penduduk Kota Semarang, 2023 24
Gambar 2	Piramida Penduduk Kota Semarang, 2023 25
Gambar 3	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir menurut Jenis Kelamin di Kota Semarang, 2021-2023..... 27
Gambar 4	Persentase Kunjungan Penduduk yang Berobat Jalan dalam Satu Bulan Terakhir menurut Jenis Kelamin dan Tempat Berobat di Kota Semarang, 2023 28
Gambar 5	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Semarang, 2023 28
Gambar 6	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan terhadap Laki-laki di Kota Semarang, 2020-2023 29
Gambar 7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Jenis Kelamin di Kota Semarang, 2020-2023 30
Gambar 8	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kegiatan Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Semarang, 2023 31
Gambar 9	Penduduk Kota Semarang Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Jenis Kelamin dan Status Pekerjaan Utama, 2023 32
Gambar 10	IPG, IPM Laki-laki, dan IPM Perempuan Kota Semarang, 2020-2023 36
Gambar 11	Perkembangan Usia Harapan Hidup (UHH) menurut Jenis Kelamin di Kota Semarang, 2020-2023 37
Gambar 12	Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) menurut Jenis Kelamin di Kota Semarang, 2020-2023 38
Gambar 13	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menurut Jenis Kelamin

	di Kota Semarang, 2020-2023	39
Gambar 14	Perkembangan Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan menurut Jenis Kelamin di Kota Semarang, 2020-2023 (Ribu Rupiah)	40
Gambar 15	IPG Ibukota Provinsi di Pulau Jawa, 2023	43
Gambar 16	IDG Kota Semarang, 2020-2023	47
Gambar 17	Perkembangan Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kota Semarang, 2020-2023	48
Gambar 18	Perkembangan Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional di Kota Semarang, 2020-2023	49
Gambar 19	Perkembangan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja di Kota Semarang, 2020-2023	50
Gambar 20	IDG menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2023	51
Gambar 21	IDG Ibukota Provinsi di Pulau Jawa, 2023	52

<https://semarangkota.bps.go.id>

RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu isu yang masih gencar diperbincangkan adalah isu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan atau dengan istilah lain isu kesetaraan gender. Pemaknaan terhadap istilah kesetaraan gender ini khususnya mengenai masalah ketimpangan antara keadaan dan kedudukan perempuan dan laki-laki di masyarakat. Hal tersebut dikarenakan perempuan masih memiliki kesempatan terbatas dibandingkan dengan laki-laki untuk berperan aktif dalam berbagai program dan aktivitas lainnya di masyarakat, seperti kegiatan ekonomi, sosial-budaya, pendidikan, organisasi dalam kelembagaan, dsb. Keterbatasan ini berasal dari berbagai nilai dan norma masyarakat yang membatasi ruang gerak perempuan dibandingkan laki-laki.

Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Semarang tahun 2023 tercatat sebesar 95,91 meningkat dibanding IPG Kota Semarang tahun 2022 yang tercatat 95,89. Penjabarannya, IPM laki-laki di Kota Semarang sebesar 86,53 dan perempuan sebesar 82,99. Secara tren, perkembangan pembangunan manusia kelompok perempuan tumbuh lebih cepat dibanding pada kelompok laki-laki. Dalam kurun waktu 2018 hingga 2022, rata-rata pertumbuhan IPM laki-laki sekitar 0,51 persen per tahun, sementara perempuan meningkat 0,66 persen per tahun. Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, IPG Kota Semarang secara umum mengalami peningkatan. Tahun 2023, IPM laki-laki mengalami peningkatan sebesar 0,50 persen dan IPM perempuan mengalami peningkatan sebesar 0,56 persen.

Secara wilayah, IPG Kota Semarang pada tahun 2023 berada pada level 95,91; lebih tinggi dari IPG Provinsi Jawa Tengah yaitu pada level 93,31. IPG tertinggi dicapai oleh Kabupaten Sukoharjo (97,32), sedangkan IPG terendah dicapai oleh Kabupaten Blora (85,68). Capaian IPG kabupaten/kota di Jawa Tengah relatif bervariasi. Sebagian besar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah memiliki nilai IPG di atas 90. Ada 8 Kabupaten/Kota dengan IPG di bawah 90 yaitu Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Rembang, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Banyumas. Jika dibandingkan dengan ibukota provinsi lain di Pulau Jawa, IPG Kota Semarang berada pada urutan ketiga setelah Kota Yogyakarta (99,04) dan Kodya Jakarta Pusat (97,60).

Pemberdayaan gender di Kota Semarang pada periode 2020-2023 mengalami fluktuasi, meskipun perubahan nilainya tidak terlalu signifikan, yakni antara 73 – 74 poin. Pada tahun 2023 IDG Kota Semarang berada pada level 73,86 poin, turun 0,07 poin dibandingkan tahun 2022. Penurunan IDG pada tahun 2023 terutama terjadi karena penurunan komponen perempuan sebagai tenaga profesional dan komponen sumbangan dalam pendapatan kerja. Persentase keterlibatan perempuan di parlemen stabil di 18,00 pada tahun 2022 dan 2023, sedangkan persentase perempuan sebagai tenaga profesional turun dari 49,78 pada tahun 2022 menjadi 48,76 pada tahun 2023 dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja juga turun dari 38,05 pada tahun 2022 menjadi 37,93 pada tahun 2023.

Secara wilayah, IDG Kota Semarang pada tahun 2023 berada pada level 73,86; lebih rendah dari IDG Provinsi Jawa Tengah yaitu pada level 74,18. IDG tertinggi dicapai oleh Kabupaten Temanggung (84,38), sedangkan IDG terendah dicapai oleh Kabupaten Wonosobo (48,92). Capaian IDG kabupaten/kota di Jawa Tengah relatif bervariasi. Sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Tengah memiliki nilai IDG 70-80. Hanya ada lima kabupaten/kota dengan IDG di atas 80 yaitu Kabupaten Temanggung, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Pemasang, Kota Surakarta, dan Kota Magelang. Namun masih terdapat tiga kabupaten/kota dengan IDG di bawah 60 yaitu Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Wonosobo. Jika dibandingkan dengan ibukota provinsi lain di Pulau Jawa, IDG Kota Semarang berada pada urutan keempat setelah Kota Surabaya (85,29), Kodya Jakarta Pusat (79,02), dan Kota Yogyakarta (75,70).

Profil Gender Kota Semarang Tahun 2023

IPG = 95,91

Perempuan

Laki-laki

82,99

IPM

86,53

79,83

UHH

76,13

15,54

HLS

15,76

10,47

RLS

11,54

Pengeluaran per Kapita

15.238

Ribu

17.549



Indeks Pemberdayaan Gender Kota Semarang Tahun 2023

IDG = 73,86



Keterlibatan
Perempuan
di Parlemen

18 %

% Tenaga
Profesional
Perempuan

48,76 %



Sumbangan
Pendapatan
Perempuan

37,93 %



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sustainable Development Goals (SDGs) atau dikenal dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan agenda pembangunan global yang disepakati oleh negara-negara di dunia hingga tahun 2030. TPB mencakup tujuh belas tujuan, yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesenjangan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh; dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut mengadopsi SDGs dalam strategi pembangunan nasional.

Pembangunan pada dasarnya harus memberikan keadilan dan kemakmuran kepada semua masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan manusia Indonesia, yaitu mencapai kesetaraan gender dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Namun disadari bahwa keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan, sebagian masih belum maksimal.

Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terkait gender sangatlah penting untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, pengukuran pencapaian pembangunan manusia berbasis gender menjadi hal yang sangat diperlukan.

Istilah gender berbeda dengan karakteristik laki-laki dan perempuan secara biologis. Konsep gender mengacu pada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam peran, perilaku, kegiatan, serta atribut yang dikonstruksikan secara sosial. Perbedaan ini tidak menjadi masalah bila disertai dengan keadilan, sebab ketidakadilan yang

terjadi dapat mengakibatkan kerugian bagi laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, kesetaraan gender merupakan hak yang semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan.

Kesetaraan gender dimaknai sebagai keadaan dimana perempuan dan laki-laki memiliki kondisi yang setara untuk dapat merealisasikan haknya secara penuh sebagai manusia dan untuk dapat memberikan kontribusi, serta memperoleh manfaat dari pembangunan. Oleh sebab itulah kesetaraan gender menjadi bagian dari target pembangunan bagi negara-negara yang mengalami disparitas pembangunan yang tinggi seperti Indonesia. Ketimpangan pembangunan antarkelompok jenis kelamin mengakibatkan pembangunan tidak dapat mencapai potensinya yang optimal. Kondisi yang ideal dalam pembangunan manusia yang diharapkan adalah kelompok penduduk laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama untuk berperan dalam pembangunan, memegang kendali atas sumber daya pembangunan yang ada, serta menerima manfaat dari pembangunan yang setara dan adil.

Dalam mengukur kesetaraan gender tersebut, ada beberapa indeks yang digunakan yaitu IPM, IPG, dan IDG. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran kualitas hidup manusia dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Ukuran tersebut kemudian digunakan untuk mengukur Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang difokuskan pada faktor ketidaksetaraan akses dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan di berbagai level. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi yaitu dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, kegiatan politik dengan indikator keterlibatan perempuan di parlemen, serta dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, dan teknisi. Kesimpulannya, IDG digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

1.2 Tujuan

Penyusunan Publikasi Analisis Pembangunan dan Pemberdayaan Gender Kota

Semarang 2023 bertujuan untuk memaparkan sejauh mana perkembangan pembangunan dan pemberdayaan gender di Kota Semarang. Tersedianya informasi tersebut diharapkan akan dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan dalam menyusun program dan kebijakan di Kota Semarang, khususnya yang berkaitan dengan program-program pembangunan dan pemberdayaan gender di Kota Semarang.

1.3 Ruang Lingkup dan Sumber Data

Ruang lingkup penyusunan Publikasi Analisis Pembangunan dan Pemberdayaan Gender Kota Semarang 2023 mencakup wilayah administratif Kota Semarang. Sedangkan rentang isu yang dibahas mencakup aspek kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan kesempatan dalam pemerintahan.

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini berasal dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) periode survei tahun 2021 - 2023 yang tertuang dalam Publikasi Statistik Sosial dan Kependudukan Jawa Tengah Hasil Susenas 2021 - 2023, berbagai data sekunder yang terdapat dalam Publikasi Kota Semarang Dalam Angka 2024, Analisis Pembangunan Manusia Berbasis Gender Jawa Tengah 2023, dan data-data sekunder yang diunduh dari website Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan analisis.

BAB III

METODOLOGI

BAB II

METODOLOGI

Indeks Pembangunan Gender (IPG) diperkenalkan pertama kali oleh UNDP pada tahun 1995, lima tahun setelah UNDP memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). UNDP menggunakan metode yang sama hingga tahun 2009. Pada metode lama tersebut, IPG tidak mengukur langsung ketimpangan antargender yang terjadi, namun hanya disparitas dari masing-masing komponen IPM untuk setiap jenis kelamin. Selain itu, angka IPG metode ini tidak bisa diinterpretasikan terpisah dari IPM.

Penghitungan IPG berhenti dilakukan oleh UNDP mulai tahun 2010 hingga 2013. Pada tahun 2014, UNDP kembali melakukan penghitungan IPG dengan menggunakan metode baru. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan yang terjadi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru ini merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian IPM. Pada metode baru ini digunakan rasio IPM perempuan dengan IPM laki-laki, sehingga bisa terlihat pencapaian pembangunan manusia antara perempuan dengan laki-laki.

2.1 Konsep Pembangunan Gender

Gender merupakan serangkaian karakteristik yang terikat dan membedakan maskulinitas dan feminitas. Karakteristik tersebut dapat mencakup jenis kelamin serta berbagai hal yang ditentukan berdasarkan jenis kelamin. Istilah gender mulai diperkenalkan oleh ilmuwan sosial. Konsep perbedaan pada maksud gender tidak menjadi masalah bila disertai dengan keadilan. Apabila terjadi ketidakadilan, dapat mengakibatkan kerugian baik pihak laki-laki maupun perempuan. Sehingga, kesetaraan gender merupakan hak yang sewajarnya terjadi agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan.

Pembangunan manusia adalah perluasan kebebasan yang nyata yang dinikmati oleh manusia dan melekat pada berbagai aspek, yaitu pemberdayaan, partisipasi,

kerjasama, keamanan, keberlanjutan, dan kesetaraan (Sen, 1989). Jika melihat komposisi jumlah penduduk, sumber daya manusia laki-laki dan perempuan hampir sama secara kuantitas. Jika terjadi kesetaraan gender dalam hal hak, tanggung jawab, kapabilitas dan peluang yang sama, niscaya akan memperkuat kemampuan suatu wilayah untuk berkembang. Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah gender sangatlah penting untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan. Pengukuran pencapaian pembangunan manusia berbasis gender menjadi hal yang sangat diperlukan.

Isu gender menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs). Kesetaraan gender tercantum dalam tujuan SDGs yang ke-5, yaitu “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan”. Kesetaraan ini meliputi sisi kesehatan, pendidikan, dan variabel sosial ekonomi lainnya, selain secara khusus dicantumkan dalam tujuan kelima, isu gender juga tercakup pada hampir seluruh tujuan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan.

Searah dengan target SDGs, meski tidak dicantumkan secara khusus, pemerintah dalam program Nawacita juga turut mencanangkan beberapa kebijakan gender yang tersirat dalam 3 agenda Nawacita, diantaranya:

- a. Cita ke-2, yaitu “Membuat Pemerintah selalu Hadir dengan Membangun Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya”, kebijakan yang termaktub adalah meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan manusia.
- b. Cita ke-4, yaitu “Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya”, kebijakannya adalah melindungi anak, perempuan, dan kelompok marjinal.
- c. Cita ke-5, yaitu “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat Indonesia”, kebijakan terkait adalah peningkatan partisipasi pendidikan dalam rangka mengurangi variasi antardaerah dan kesenjangan gender.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) menjadi salah satu alat dalam melihat keberhasilan pemerintah dalam implementasi program-program yang telah

dicanangkan terkait gender dalam nawacita maupun SDGs.

2.2 Pengukuran Indeks Pembangunan Gender

Pada tahun 2014, Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengalami perubahan pada indikator yang digunakan dan juga metodologi penghitungannya. Dalam metode baru ini, dimensi yang digunakan masih sama seperti yang disampaikan sebelumnya, yaitu:

- a. umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)
- b. pengetahuan (*knowledge*)
- c. standar hidup layak (*decent standard of living*)

Menurut UNDP, ketiga dimensi tersebut digunakan sebagai pendekatan dalam mengukur kualitas hidup, dimana hakikatnya adalah mengukur capaian pembangunan manusia. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor.

Pada tahun 2014, UNDP mengganti beberapa indikator untuk menyempurnakan metodologi yang digunakan. Pada dimensi pengetahuan dengan menggunakan angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah. Selanjutnya untuk mengukur dimensi standar hidup layak digunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

BPS mengukur dimensi umur panjang dan hidup sehat dengan menggunakan umur harapan hidup saat lahir yang didapatkan dari data Sensus Penduduk 2010 (SP2010). Kemudian mengukur dimensi pengetahuan dengan menggunakan angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas yang didapatkan dari data SUSENAS. Selanjutnya untuk mengukur dimensi standar hidup layak tidak menggunakan PNB per kapita, karena tidak terdapat angka PNB per kapita hingga kabupaten/kota. Untuk dimensi ini, dilakukan pendekatan/proksi dengan menggunakan pengeluaran per kapita yang disesuaikan yang didapatkan dari SUSENAS.

Pada penghitungan IPG, keseluruhan indikator di atas dihitung berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Pada indikator angka harapan lama sekolah, batas usia yang digunakan adalah 7 tahun ke atas. Ini merupakan indikator yang mengukur input dari dimensi pengetahuan. Sedangkan angka rata-rata lama sekolah

memiliki batas usia yaitu 25 tahun ke atas. Indikator ini digunakan sebagai tolak ukur output dari dimensi pengetahuan. Sehingga pada dimensi ini, sudah mencakup baik indikator input maupun indikator output. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat serta pengetahuan tidak diperlukan data sekunder dalam penghitungannya. Hanya pada dimensi standar hidup layak dibutuhkan beberapa data sekunder guna mendapatkan angka pengeluaran per kapita berdasarkan jenis kelamin. Data sekunder yang digunakan adalah upah yang diterima, jumlah angkatan kerja, serta jumlah penduduk untuk laki-laki dan perempuan.

Penyusunan indeks komposit dimulai dengan membangun indeks untuk masing-masing komponen. Indeks untuk masing-masing komponen dihitung sama seperti pada metode lama. Perbedaannya hanya pada batasan untuk masing-masing komponen. Berikut adalah nilai minimum dan maksimum untuk masing-masing komponen.

Tabel 2.2.1 Batas Minimum dan Maksimum Indikator IPG

Indikator (1)	Maksimum		Minimum	
	(2)	(3)	(4)	(5)
Umur Harapan Hidup (Tahun)	82,5	87,5	17,5	22,5
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	18	18	0	0
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	15	15	0	0
Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan (Rupiah)	26.572.352		1.007.436	

Penyusunan indeks masing-masing indikator, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Indeks } X_{(i,j)} = \frac{(X_{(i,j)} - X_{(i-\min)})}{(X_{(i-\max)} - X_{(i-\min)})}$$

Dimana :

$X_{(i,j)}$: indeks komposit komponen ke-i

$X_{(i-\min)}$: nilai minimum komponen

$X_{(i-\max)}$: nilai maksimum komponen

Setelah masing-masing komponen memiliki indeks, dilakukan penghitungan untuk indeks pendidikan. Penghitungan indeks pendidikan menggunakan rata-rata aritmatik yaitu:

$$X_{pendidikan} = \frac{X_{p1} + X_{p2}}{2}$$

Metode agregasi yang dilakukan guna mendapatkan angka IPM laki-laki dan perempuan sama seperti metode agregasi yang dilakukan ketika ingin mendapatkan angka IPM. Metode agregasi yang digunakan adalah rata-rata geometrik dengan rumus sebagai berikut :

$$IPM_L = \sqrt[3]{X_{kesehatan\ l} \times X_{pendidikan\ l} \times X_{pengeluaran\ l}}$$

$$IPM_P = \sqrt[3]{X_{kesehatan\ p} \times X_{pendidikan\ p} \times X_{pengeluaran\ p}}$$

Penggunaan rata-rata geometrik ini sangat beralasan, yaitu rata-rata geometrik ini cenderung sensitif terhadap ketimpangan. Tidak seperti rata-rata aritmatik yang dapat menutupi ketimpangan yang terjadi antardimensi, rata-rata geometrik menuntut keseimbangan antar dimensi. Pada metode baru, penghitungan angka IPG tidak lagi dengan membandingkannya dengan angka IPM, namun dengan menggunakan rasio sebagai berikut :

$$IPG = \frac{IPM_P}{IPM_L}$$

Angka ini menunjukkan rasio antara pembangunan perempuan dan pembangunan laki-laki. Ketika angka indeks pembangunan gender makin mendekati 100, maka pembangunan gender semakin seimbang atau merata. Namun semakin menjauhi 100, maka pembangunan gender makin timpang antar jenis kelamin.

2.3 Perubahan Interpretasi

Akibat perubahan metodologi yang terjadi, terjadi pula perubahan interpretasi dari angka IPG. Pada metode lama, angka IPG yang dihasilkan harus dibandingkan dengan angka IPM. Semakin kecil selisih angka IPG dengan angka IPM, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Pada metode baru,

interpretasi dari angka IPG berubah. Interpretasi angka IPG tidak perlu dibandingkan lagi dengan angka IPM.

Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dengan perempuan. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Angka 100 dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IPG karena angka tersebut merupakan nilai rasio paling sempurna.

2.4 Konsep Pemberdayaan Gender

Konsep pemberdayaan gender lebih mengacu pada proses terbukanya kesempatan yang setara ataupun sama. Sesuai dengan konsep UNDP (1995) yang memfokuskan makna pemberdayaan pada *opportunity*, bukan pada kapabilitas, yang menjadi ukuran *well-being*. Salah satu indikasi terciptanya kesetaraan gender dalam konsep pemberdayaan adalah kontribusi yang sama dalam sektor publik antara laki-laki dan perempuan. Seiring berjalannya waktu, peran perempuan di sektor publik menunjukkan hasil yang menggembirakan. Perkembangan ketenagakerjaan yang semakin kondusif kontribusinya terhadap perempuan, menunjukkan bahwa sektor publik bukan lagi ranah yang hanya ditujukan untuk laki-laki.

Dalam mengukur capaian pemberdayaan gender di Indonesia digunakan sebuah indeks komposit yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini merupakan nama lain dari *Gender Empowerment Measure* (GEM) yang dihitung oleh UNDP. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Titik beratnya adalah seberapa besar partisipasi perempuan, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan.

IDG diperoleh dari rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, dan sumbangan pendapatan perempuan. Arah dan perubahan IDG sangat dipengaruhi oleh ketiga komponen tersebut. Jika IPG mengukur capaian kualitas pembangunan manusia terpilah gender dari sisi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, maka IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi.

Tabel 2.4.1 Dimensi dan Indikator Pembentukan IDG

Dimensi (1)	Indikator (2)
Keterwakilan di Parlemen	Proporsi keterwakilan di parlemen laki-laki dan perempuan
Pengambilan Keputusan	Proporsi dari manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi; laki-laki dan perempuan
Distribusi Pendapatan	Upah buruh non pertanian; laki-laki dan perempuan

Sumber: BPS

Dalam penghitungan IDG, terlebih dahulu dihitung indeks untuk masing-masing komponen berdasarkan persentase yang ekuivalen dengan distribusi penduduk yang merata. Penghitungan sumbangan pendapatan untuk IDG sama dengan penghitungan untuk IPG. Selanjutnya masing-masing indeks komponen dibagi 50. Nilai 50 dianggap sebagai kontribusi ideal dari masing-masing kelompok gender untuk semua komponen IDG. Indikator dalam IDG sebenarnya masih belum mencakup semua ranah kehidupan secara keseluruhan, seperti pada indikator parlemen, dianggap hanya relevan bagi negara maju (Klasen, 2006).

Kemudian pada indikator pengambilan keputusan hanya dilihat pada aspek ekonomi semata, padahal ketimpangan gender lebih banyak terjadi pada aspek non-ekonomi seperti pengambilan keputusan dalam rumah tangga (pemilihan menu makanan, pembelian alat-alat rumah tangga, pemeliharaan kesehatan anggota rumah tangga, dan pengaturan pembayaran sekolah). Metode penghitungan IDG memang masih mengacu pada metodologi lama sampai Indeks Ketidaksetaraan Gender (IKG) bisa dihitung. Meski demikian, secara umum Indeks Pemberdayaan Gender tetap dapat memperlihatkan capaian pemberdayaan secara gender yang ada di masyarakat.

BAB III

GAMBARAN UMUM GENDER DI KOTA SEMARANG

BAB III

GAMBARAN UMUM GENDER DI KOTA SEMARANG

Perempuan adalah sumber daya manusia yang jumlahnya besar dan memiliki potensi yang tinggi dalam kaitannya sebagai subyek dan obyek pembangunan. Sebagai bagian terbesar dari sumber daya manusia, perempuan memiliki peran strategis dalam kehidupan. Peran penting tersebut tercermin dalam segala aspek kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat bahkan negara. Oleh sebab itu, untuk memaksimalkan peran yang begitu besar perempuan harus memiliki kualitas yang dapat diandalkan. Kualitas manusia, baik laki-laki atau perempuan, dapat dikatakan tinggi jika memiliki pilihan-pilihan hidup yang lebih baik. Pilihan-pilihan tersebut meliputi pendidikan dan keterampilan yang tinggi, tingkat kesehatan yang tinggi, dan pendapatan yang tinggi pula.

Saat ini upaya untuk meningkatkan peran dan kualitas perempuan dalam pembangunan telah banyak dikembangkan, akan tetapi kesenjangan gender masih terjadi di berbagai lini jika dibandingkan dengan laki-laki. Paradigma perempuan yang masih dianggap sebagai "*konco wingking*" sedikit banyak mempengaruhi peran perempuan saat berkiprah di lingkungannya. Padahal jumlah perempuan yang banyak merupakan modal pembangunan yang potensial jika dikembangkan secara tepat dan berkualitas.

Peran Sumber Daya Manusia (SDM) perempuan yang berkualitas paling tidak memiliki dampak pada dua hal. Pertama, dengan kualitas yang dimiliki, perempuan akan menjadi mitra kerja aktif laki-laki dalam mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik yang diarahkan pada pemerataan pembangunan. Kedua, perempuan yang berkualitas turut mempengaruhi kualitas generasi penerus, mengingat fungsi reproduksi perempuan berperan dalam mengembangkan sumber daya manusia di masa datang. Tetapi pada kenyataannya, selama ini peran serta kaum perempuan dalam pelaksanaan program pembangunan masih belum dimanfaatkan secara optimal. Faktor penyebab belum optimalnya peran serta perempuan dalam pembangunan

karena masih rendahnya kualitas sumber daya perempuan sehingga tidak mampu untuk bersaing dalam berbagai bidang dengan mitra seajarnya.

Kemampuan perempuan untuk menikmati dan berperan aktif dalam pembangunan masih terkendala dan masih menjadi masalah utama dalam pembangunan. Pembangunan yang dilakukan harus sesuai dengan kebutuhan dan didukung oleh data yang akurat sehingga indikator-indikator pembangunan perempuan yang masih rendah dapat digenjut untuk mencapai hasil yang maksimal.

3.1 Kependudukan

Penduduk merupakan komponen utama dalam pembangunan nasional yang tidak hanya digunakan sebagai alat pembangunan tapi juga sebagai sasaran dalam pembangunan. Jumlah penduduk laki-laki di Kota Semarang Tahun 2023 menurut hasil Proyeksi Penduduk 2020-2050 hasil Sensus Penduduk 2020 sebanyak 838,44 ribu jiwa, atau 49,47 persen dari total penduduk Kota Semarang. Sementara jumlah penduduk perempuan di Kota Semarang sebanyak 856,31 ribu jiwa, atau 50,53 persen dari total penduduk Kota Semarang. Dari kedua informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa rasio jenis kelamin penduduk Kota Semarang sebesar 97,91. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan masih sedikit lebih besar dibanding dengan penduduk laki-laki.

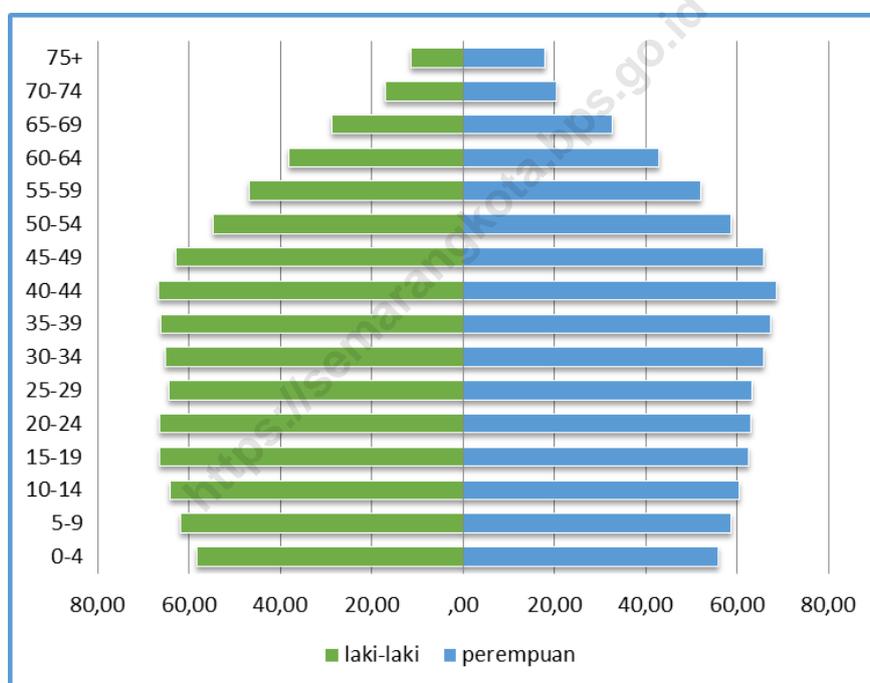


Sumber: Publikasi Kota Semarang dalam Angka 2024, diolah

Gambar 1 Rasio Jenis Kelamin menurut Kelompok Umur Penduduk Kota Semarang, 2023

Rasio jenis kelamin kelompok umur muda hingga menjelang 30 tahun menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Pada kelompok umur yang lebih tinggi, karena umur harapan hidup laki-laki lebih rendah dari perempuan, maka kecenderungannya jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk perempuan.

Dilihat dari kumulatif menurut usia produktif (15-64 tahun), jumlah perempuan di Kota Semarang mendominasi sebesar 50,52 persen. Besarnya potensi perempuan dapat dimanfaatkan sebagai aset pembangunan, namun jika tidak diimbangi dengan kualitas justru akan dapat menambah beban dan menghambat pembangunan.



Sumber: Publikasi Kota Semarang dalam Angka 2024, diolah

Gambar 2 Piramida Penduduk Kota Semarang, 2023

3.2 Kesehatan

Kesehatan adalah kebutuhan mendasar dalam kehidupan yang mencerminkan kualitas dari sumber daya manusia. Untuk mencapai hal tersebut, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk pembangunan kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan pelayanan. Pembangunan kesehatan adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat

memperoleh kesehatan secara mudah, murah, dan merata.

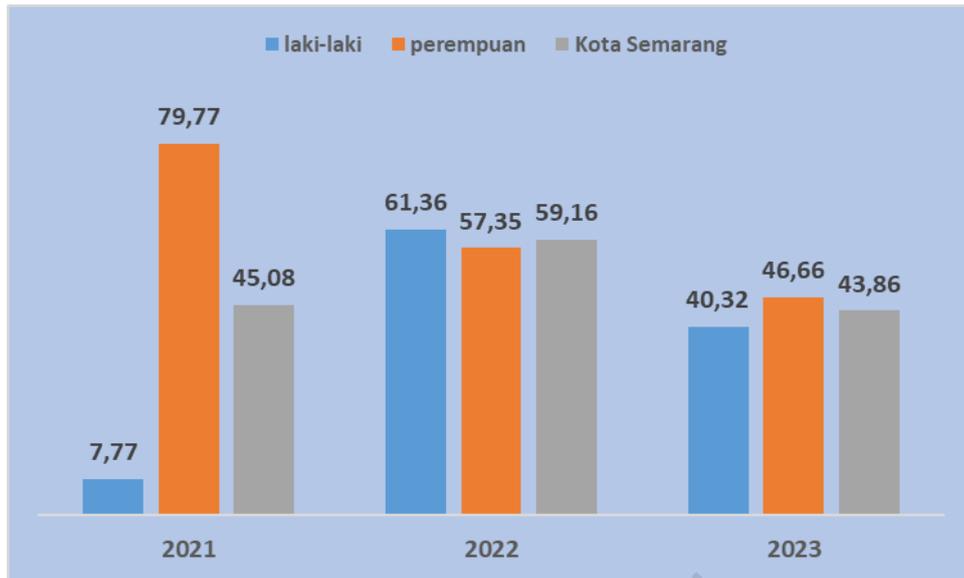
Salah satu indikator yang relevan terkait derajat kesehatan penduduk suatu wilayah adalah angka kesakitan yang dapat digambarkan melalui persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan. Keluhan kesehatan yang dimaksud adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Pada umumnya keluhan kesehatan utama yang banyak dialami oleh penduduk adalah panas, sakit kepala, batuk, pilek, diare, asma/sesak nafas, dan sakit gigi. Orang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya (<https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/16>).

Tabel 3.2.1 Angka Kesakitan menurut Jenis Kelamin di Kota Semarang, 2021-2023

Tahun	Angka Kesakitan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
2021	44,52	45,14	44,83
2022	8,49	9,48	8,99
2023	6,68	8,55	7,64

Sumber: Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Semarang 2021-2023, diolah

Dari tabel 3.1 terlihat bahwa angka kesakitan penduduk perempuan Kota Semarang yang mengalami keluhan kesehatan selama periode 2021-2023 memiliki kecenderungan lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Indikator angka kesakitan dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan. Melalui upaya tersebut, diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

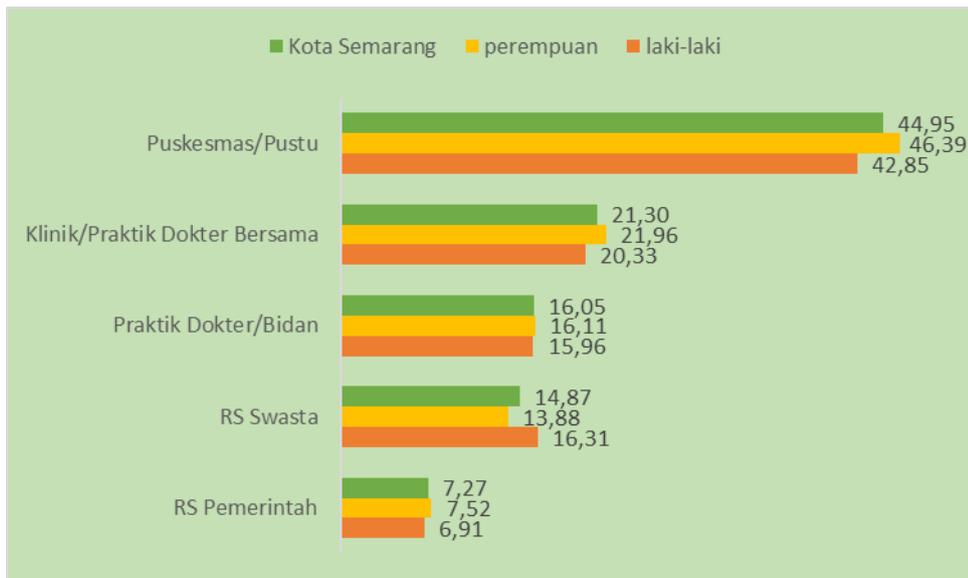


Sumber: Publikasi Statistik Sosial dan Kependudukan Jawa Tengah Hasil Susenas Tahun 2021-2023, diolah

Gambar 3 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir menurut Jenis Kelamin di Kota Semarang, 2021-2023

Derajat Kesehatan juga dapat dilihat dari persentase penduduk perempuan di Kota Semarang yang mempunyai keluhan kesehatan dan berobat jalan dalam sebulan terakhir. Pada tahun 2022 dan 2023, terjadi penurunan persentase penduduk yang melakukan berobat jalan, baik laki-laki maupun perempuan.

Penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dapat melakukan pengobatan dengan memeriksakan diri dan mendapatkan pengobatan dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia selayaknya diimbangi dengan keberadaan tenaga kesehatan yang mencukupi pula agar pelayanan kesehatan semakin berkualitas. Dari data SUSENAS tahun 2023, terlihat bahwa baik penduduk laki-laki maupun perempuan di Kota Semarang yang mengalami keluhan kesehatan memiliki kecenderungan untuk melakukan pengobatan ke puskesmas, klinik/praktik dokter bersama, praktik dokter/bidan, dan RS Swasta.

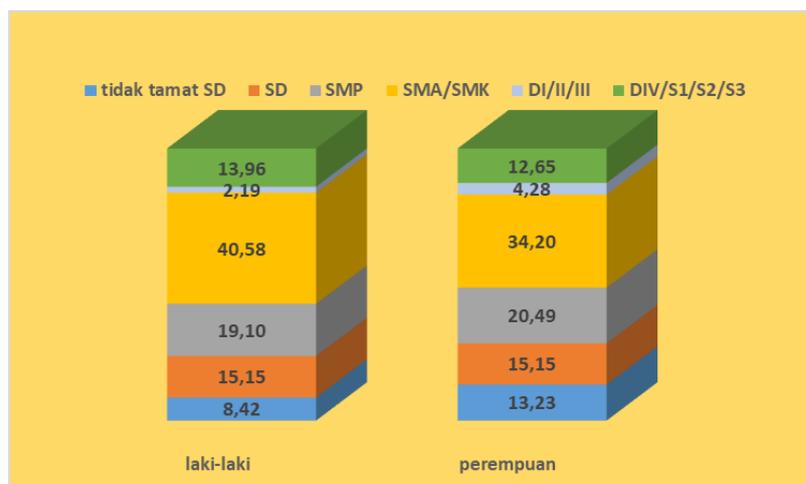


Sumber: Publikasi Statistik Sosial dan Kependudukan Jawa Tengah Hasil Susenas Tahun 2023, diolah

Gambar 4 Persentase Kunjungan Penduduk yang Berobat Jalan dalam Satu Bulan Terakhir menurut Jenis Kelamin dan Tempat Berobat di Kota Semarang, 2023

3.3 Pendidikan

Pendidikan sangat erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia di suatu negara. Pendidikan juga merupakan salah satu aspek yang dapat digunakan untuk melihat kesetaraan gender. Di Kota Semarang, kesempatan untuk memperoleh pendidikan antara laki-laki dan perempuan sudah mulai setara. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, maka kesenjangan antara laki-laki dan perempuan sudah mulai berkurang.

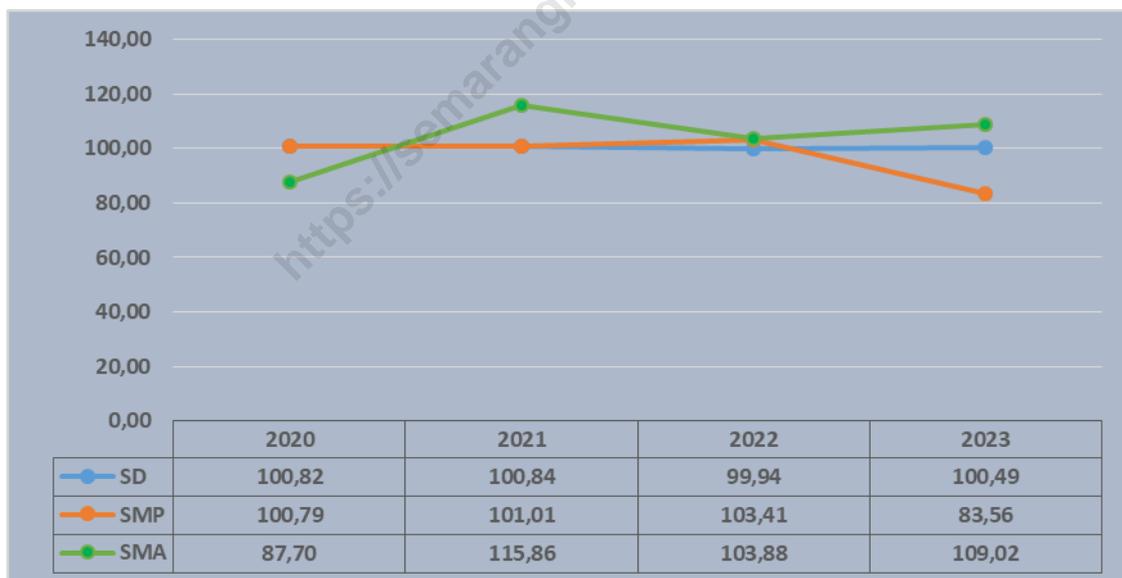


Sumber: Publikasi Statistik Sosial dan Kependudukan Jawa Tengah Hasil Susenas Tahun 2023, diolah

Gambar 5 Persentase Penduduk Berumur 10 tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Semarang, 2023

Persentase perempuan yang memperoleh ijazah SMP dan DI/II/III melebihi persentase laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa budaya masyarakat yang memprioritaskan laki-laki untuk memperoleh pendidikan dasar dibanding perempuan sudah mulai memudar. Namun pada jenjang pendidikan SMA/SMK dan DIV/S1/S2/S3, persentase perolehan ijazah laki-laki masih lebih besar dibandingkan perempuan meskipun perbedaan persentasenya tidak terlalu signifikan.

Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dapat juga dilihat dari rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan terhadap laki-laki. APM adalah proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya. Pada tahun 2023, rasio APM pada jenjang SD dan SMA di atas 100, sedangkan untuk SMP di bawah 100. Hal ini menunjukkan bahwa, kesempatan perempuan untuk bersekolah pada jenjang SMP lebih rendah dibandingkan laki-laki, sedangkan untuk jenjang SD dan SMA, kesempatan perempuan untuk bersekolah lebih tinggi dibandingkan laki-laki.



Sumber: Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Semarang 2023, diolah

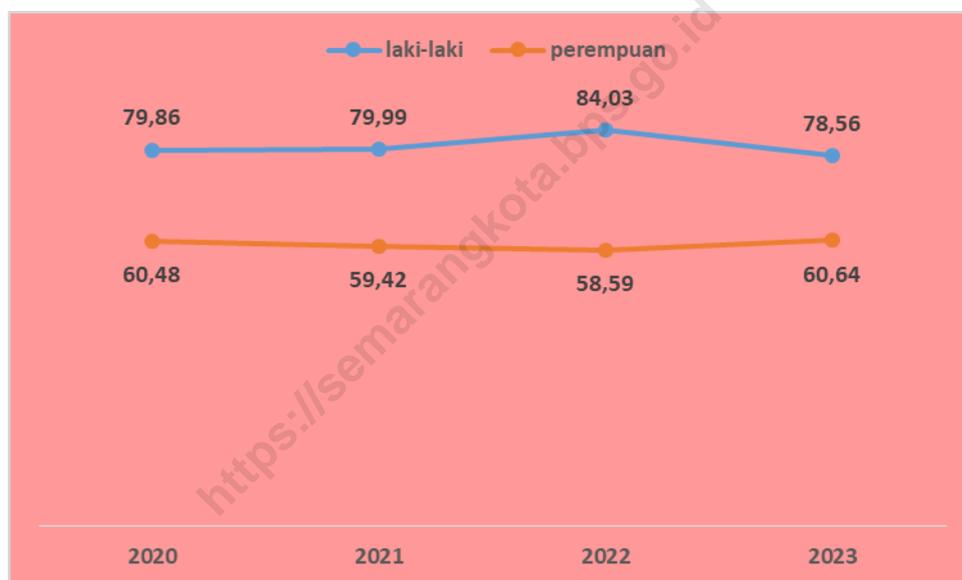
Gambar 6 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan terhadap Laki-laki di Kota Semarang, 2020-2023

3.4 Ketenagakerjaan

Dalam kehidupan bermasyarakat, jenis kelamin masih sering digunakan sebagai persyaratan dalam pembagian kerja. Laki-laki memiliki kewajiban untuk mencari nafkah

dan bekerja, sedangkan perempuan memiliki kewajiban untuk mengurus rumah tangga. Selain itu, laki-laki dianggap memiliki fisik yang kuat yang menyebabkan laki-laki memiliki peluang lebih tinggi untuk mendapatkan kesempatan kerja dibandingkan perempuan. Namun di sisi lain, banyak juga jenis pekerjaan yang mensyaratkan dilakukan oleh perempuan karena lebih memerlukan ketelatenan dan ketelitian.

Perbedaan kesempatan kerja tersebut berdampak pada partisipasi tenaga kerja yang tercermin dari angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Pada tahun 2023 angka TPAK perempuan hanya sekitar 60,64 persen, sedangkan TPAK laki-laki sudah mencapai sekitar 78,56 persen. Angka TPAK ini menunjukkan adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek ketenagakerjaan.

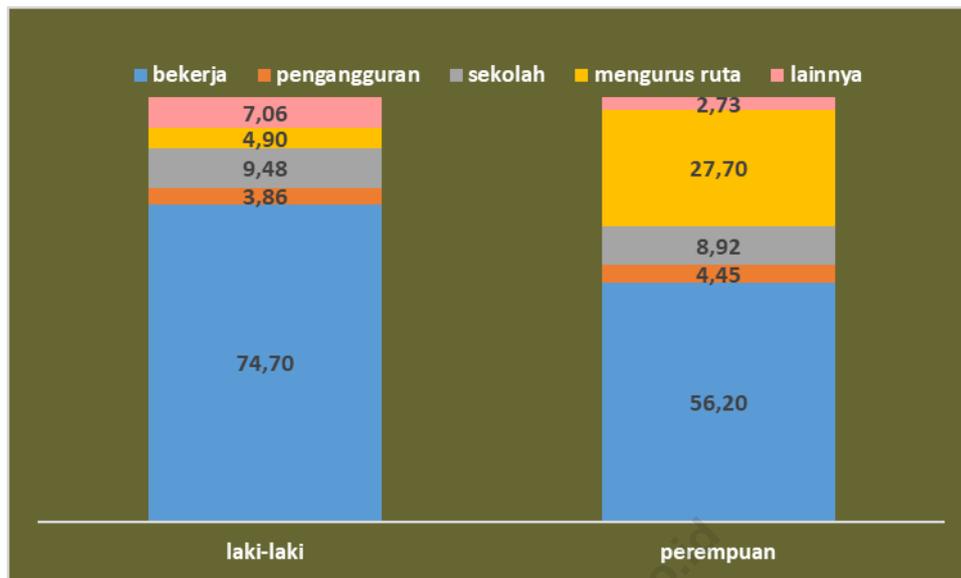


Sumber: Publikasi Kota Semarang dalam Angka 2023, diolah

Gambar 7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Jenis Kelamin di Kota Semarang, 2020-2023

Dilihat dari proporsi penduduk yang bekerja, terlihat bahwa persentase perempuan yang bekerja masih jauh lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2023, proporsi perempuan yang bekerja sebesar 56,20 persen sedangkan proporsi laki-laki mencapai 74,70 persen. Rendahnya TPAK perempuan dapat dilihat pada kegiatan seminggu yang lalu yang sekaligus menunjukkan adanya stigma pembagian peran laki-laki adalah bekerja dan perempuan adalah mengurus rumah tangga. Pada 2023 dicatat bahwa selain bekerja, sebagian penduduk perempuan melakukan kegiatan lain selama seminggu yang lalu seperti mengurus rumah tangga dengan proporsi 27,70 persen.

Sementara laki-laki yang mengurus rumah tangga hanya sebesar 4,90 persen.



Sumber: Publikasi Kota Semarang dalam Angka 2024, diolah

Gambar 8 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kegiatan Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Semarang, 2023

Kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan juga terlihat dari status pekerjaan utama. Persentase perempuan sebagai pekerja keluarga mencapai 6,50 persen dari semua perempuan usia 15 tahun ke atas yang bekerja. Angka tersebut lebih tinggi dari persentase laki-laki yang hanya 2,27 persen. Hal ini menunjukkan bahwa persentase perempuan yang bekerja namun tidak mendapat upah jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki.



Sumber: Publikasi Kota Semarang dalam Angka 2024, diolah

Gambar 9 Penduduk Kota Semarang Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Jenis Kelamin dan Status Pekerjaan Utama, 2023

BAB IV

*CAPAIAN PEMBANGUNAN GENDER
DI KOTA SEMARANG*

BAB IV

PEMBANGUNAN GENDER DI KOTA SEMARANG

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Pada prosesnya, pembangunan di suatu negara tidak terlepas dari pengaruh sumber daya manusia sebagai pelaku yang ada di dalamnya. Menurut Tikson (2005), salah satu tolak ukur dari tingkat keberhasilan pembangunan suatu wilayah adalah pembangunan manusia yang dimilikinya.

Menurut Sen (1989), pembangunan manusia meliputi konsep yang luas, mencakup pemberdayaan, kerjasama, kesetaraan, keberlanjutan, dan keamanan. Untuk menyederhanakan konsep yang sangat luas ini, *United Nations Development Programme* (UNDP) menyusun ukuran pembangunan manusia yang dikenal sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

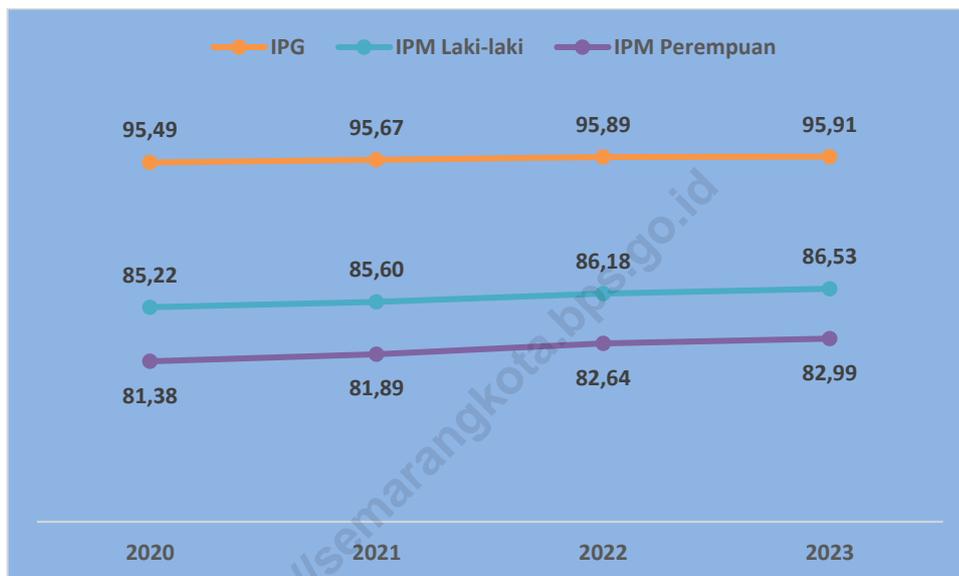
Selanjutnya, agar ukuran ini juga dapat digunakan untuk membandingkan capaian pembangunan berbasis gender, maka UNDP mengembangkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebagai turunan IPM. IPG merupakan rasio antara IPM perempuan dan IPM laki-laki. Dengan adanya ukuran terpisah antara IPM laki-laki dan IPM perempuan, maka analisis tentang kualitas hidup masing-masing kelompok gender tersebut dapat dilakukan secara parsial.

4.1 Capaian Pembangunan Gender Kota Semarang

Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Semarang tahun 2023 tercatat sebesar 95,91 meningkat 0,02 poin dibanding IPG Kota Semarang tahun 2022 yang tercatat sebesar 95,89. Penjabarannya, IPM laki-laki di Kota Semarang sebesar 86,53 dan perempuan sebesar 82,99. Sejak tahun 2018, IPM laki-laki dan IPM perempuan sudah berstatus 'sangat tinggi' (nilainya di atas 80). Meskipun begitu, masih terdapat kesenjangan capaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan di Kota Semarang. Hal inilah yang menyebabkan IPG Kota Semarang masih berada di bawah angka 100 dalam kurun waktu 2018 hingga sekarang.

Meskipun IPM laki-laki di Kota Semarang lebih tinggi dibandingkan IPM

perempuan, namun IPM perempuan tumbuh lebih cepat dibandingkan IPM laki-laki. Dalam kurun waktu 2020 hingga 2023, rata-rata pertumbuhan IPM laki-laki sekitar 0,51 persen, sementara perempuan 0,66 persen. IPG Kota Semarang mengalami kenaikan berturut-turut pada tahun 2021 hingga tahun 2023. IPM laki-laki dan IPM perempuan masing-masing mengalami kenaikan sepanjang tahun 2021 hingga tahun 2023, menandakan semakin baiknya kualitas pembangunan laki-laki dan perempuan di Kota Semarang.



Sumber: <http://jateng.bps.go.id>, diolah

Gambar 10 IPG, IPM Laki-laki, dan IPM Perempuan Kota Semarang, 2020-2023

4.2 Perkembangan Komponen Penyusun IPM Kota Semarang

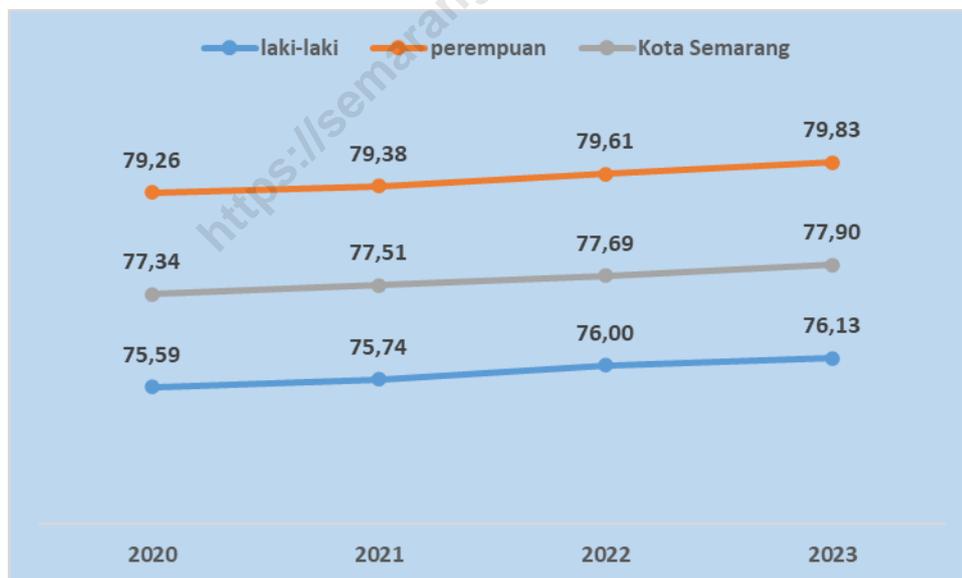
IPM tersusun atas tiga aspek mendasar pembangunan manusia. Aspek kesehatan yang bermakna mempunyai umur panjang diwakili oleh indikator umur harapan hidup, aspek pendidikan yang direpresentasikan oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta dimensi perekonomian yang bermakna kehidupan yang layak digambarkan dengan kemampuan daya beli (paritas daya beli). Ketiga aspek tersebut dianggap mampu untuk merepresentasikan pembangunan manusia sehingga sampai saat ini penghitungan IPM masih menjadi rujukan negara-negara di dunia dalam mengukur perkembangan pembangunan manusia.

Perkembangan IPM dari tahun ke tahun sangat dipengaruhi oleh komponen-

komponen yang menyusunnya. Kemajuan IPM sangat tergantung pada komitmen penyelenggara pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas dasar penduduk yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup.

Perkembangan komponen kesehatan digambarkan dengan indikator umur harapan hidup. Umur harapan hidup adalah perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup (secara rata-rata). Indikator ini seringkali digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal kesejahteraan rakyat di bidang kesehatan.

Umur harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Hal ini sangat terkait dengan *Female Advantages* (FA), terutama faktor biologis dan tingkah laku atau kebiasaan dari setiap gender. Berdasarkan pada Lemaire (2002), secara biologis perempuan memiliki gen dan hormon yang menguntungkan untuk hidup lebih lama. Sedangkan dari segi gaya hidup, laki-laki lebih memiliki risiko kematian yang lebih tinggi karena stres, kebiasaan merokok, dan pekerjaan berat.



Sumber: <http://jateng.bps.go.id>, diolah

Gambar 11 Perkembangan Usia Harapan Hidup (UHH) menurut Jenis Kelamin di Kota Semarang, 2020-2023

Secara umum peningkatan pencapaian Umur Harapan Hidup (UHH) dalam periode 2020-2023 baik secara umum maupun menurut jenis kelamin menunjukkan tren membaik, atau dapat diartikan bahwa tingkat kesehatan masyarakat Kota

Semarang semakin berkualitas.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu investasi yang dilakukan pemerintah dalam membangun negara. Tingkat pendidikan yang baik akan mengarahkan suatu negara menuju kondisi yang lebih baik. Karena itu, pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam pembangunan.

Todaro (2006) mengemukakan bahwa pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Pendidikan adalah hal pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga, karena pendidikan adalah hal yang fundamental untuk membentuk kapabilitas manusia yang lebih luas dan berada pada inti makna pembangunan. Pendidikan juga memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan berkelanjutan (Sri Endang, 2010).



Sumber: <http://jateng.bps.go.id>, diolah

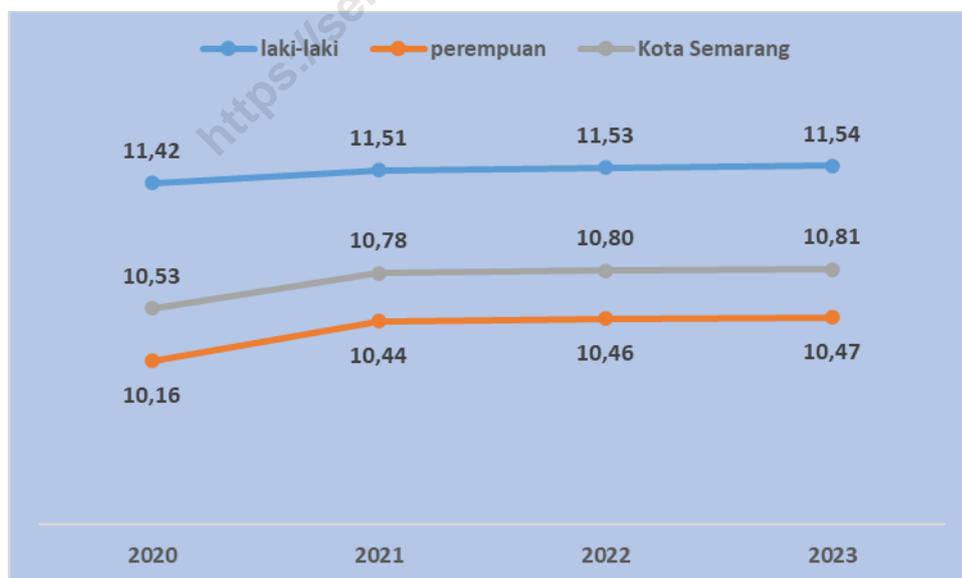
Gambar 12 Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) menurut Jenis Kelamin di Kota Semarang, 2020-2023

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan suatu negara adalah Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun keatas. HLS juga menjadi gambaran tentang keberhasilan pembangunan pendidikan. Sejak tahun 2020

hingga 2023 nilai pencapaian harapan lama sekolah penduduk laki-laki dan penduduk perempuan hampir sama, yaitu sekitar 15 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa kesetaraan pembangunan dalam aspek pendidikan dapat diwujudkan secara merata dalam waktu yang tidak lama.

Salah satu ukuran capaian pada bidang pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS), berbeda dengan harapan lama sekolah yang memperlihatkan capaian jangka pendek, rata-rata lama sekolah menggambarkan capaian pendidikan jangka panjang. Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk laki-laki dan perempuan usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Hingga tahun 2022 rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki sekitar 1 tahun lebih lama dibandingkan perempuan.

Pada tahun 2020, rata-rata lama sekolah yang dijalani penduduk laki-laki adalah sekitar 11,42 tahun, sedangkan perempuan adalah sekitar 10,16 tahun. Angka ini terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2023, rata-rata pendidikan yang dijalani oleh laki-laki adalah sekitar 11,54 tahun, sedangkan perempuan 10,47 tahun.

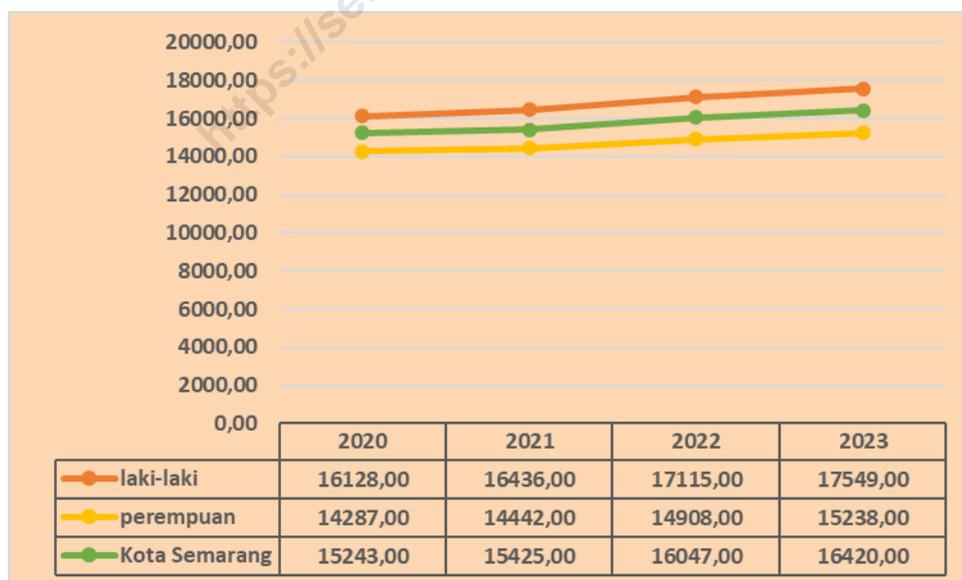


Sumber: <http://jateng.bps.go.id>, diolah

Gambar 13 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menurut Jenis Kelamin di Kota Semarang, 2020-2023

Kesetaraan gender juga dapat dilihat dari ada tidaknya perbedaan capaian perempuan dan laki-laki dalam perekonomian. Dalam konteks kesetaraan gender, indikator yang dapat menunjukkan ada tidaknya perbedaan adalah data upah dan pendapatan per kapita. Namun, karena masalah ketersediaan data upah dan pendapatan per kapita, maka indikator ini kemudian digantikan dengan data pengeluaran per kapita yang disesuaikan sebagai proksi.

Selama periode 2020 hingga 2023, nilai pengeluaran per kapita yang disesuaikan pada kelompok penduduk perempuan selalu jauh lebih rendah dibandingkan pada laki-laki. Pada tahun 2023 pengeluaran perkapita yang disesuaikan perempuan adalah sebesar 15,24 juta rupiah, sedangkan pengeluaran perkapita yang disesuaikan laki-laki adalah sebesar 17,55 juta rupiah. Rendahnya capaian perempuan dalam ekonomi salah satunya dipengaruhi oleh keterbatasan perempuan dalam memasuki pasar tenaga kerja di lapangan usaha tertentu yang lebih banyak membutuhkan tenaga kerja laki-laki, seperti pada listrik, gas dan air, serta angkutan, pergudangan dan komunikasi. Lapangan usaha yang masih didominasi oleh laki-laki tersebut memiliki tingkat produktivitas yang relatif tinggi dibanding lapangan usaha lainnya.



Sumber: <http://jateng.bps.go.id>, diolah

Gambar 14 Perkembangan Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan menurut Jenis Kelamin di Kota Semarang, 2020-2023 (Ribu Rupiah)

4.3 Disparitas IPM dan IPG Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

Pada tahun 2023, Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah adalah 73,39 poin dengan peringkat secara nasional berada pada posisi tertinggi kedua puluh. Kota Salatiga adalah daerah di Provinsi Jawa Tengah dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia terbesar (ranking tertinggi), yakni sebesar 84,99 poin pada tahun 2023. Indeks Pembangunan Manusia terendah di Provinsi Jawa Tengah berada pada Kabupaten Pemalang, yakni sebesar 68,08 poin pada tahun 2023. Indeks Pembangunan Manusia Kota Semarang pada tahun 2023 sebesar 84,43 poin berada pada peringkat kedua jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah.

Sedangkan untuk Indeks Pembangunan Gender di Jawa Tengah tahun 2023 adalah sebesar 93,31 poin dan menduduki peringkat kesebelas posisi tertinggi secara nasional. Pada level kabupaten/kota, nilai Indeks Pembangunan Gender tertinggi dicapai oleh Kabupaten Sukoharjo dengan nilai IPG sebesar 97,32 poin, sedangkan Indeks Pembangunan Gender terendah dicapai oleh Kabupaten Blora dengan nilai IPG sebesar 85,68 poin. Indeks Pembangunan Gender Kota Semarang tahun 2023 sebesar 95,91 poin berada pada urutan ketujuh tertinggi di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 4.3.1 IPM dan IPG menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2023

Provinsi/ Kabupaten/Kota (1)	IPM (2)	IPG (3)	IPG Laki-laki (4)	IPG Perempuan (5)
JAWA TENGAH	73,39	93,31	77,13	71,97
Cilacap	72,04	87,78	76,98	67,57
Banyumas	73,96	89,47	78,00	69,79
Purbalingga	70,51	93,79	74,06	69,46
Banjarnegara	69,16	95,09	71,09	67,60
Kebumen	71,88	93,38	75,36	70,37
Purworejo	74,35	95,38	76,63	73,09
Wonosobo	70,18	92,85	73,68	68,41
Magelang	71,56	92,91	75,86	70,48
Boyolali	75,41	94,67	79,05	74,84
Klaten	77,59	95,78	79,67	76,31
Sukoharjo	78,65	97,32	80,16	78,01
Wonogiri	71,97	92,08	75,98	69,96
Karanganyar	77,31	97,29	78,33	76,21
Sragen	75,10	92,48	78,98	73,04

Provinsi/ Kabupaten/Kota (1)	IPM (2)	IPG (3)	IPG Laki-laki (4)	IPG Perempuan (5)
Grobogan	71,49	86,24	77,92	67,20
Blora	70,63	85,68	75,62	64,79
Rembang	71,89	88,11	76,60	67,49
Pati	73,59	92,46	77,94	72,06
Kudus	76,71	93,81	80,30	75,33
Jepara	73,85	91,53	77,76	71,17
Demak	74,07	91,16	78,63	71,68
Semarang	75,13	96,63	76,90	74,31
Temanggung	71,33	96,13	73,34	70,50
Kendal	73,86	94,29	76,95	72,56
Batang	70,20	92,48	73,90	68,34
Pekalongan	71,45	92,84	74,95	69,58
Pemalang	68,08	87,16	72,96	63,59
Tegal	71,12	88,54	76,25	67,51
Brebes	69,71	87,09	74,38	64,78
Kota Magelang	81,17	96,38	83,26	80,25
Kota Surakarta	83,54	97,09	84,63	82,17
Kota Salatiga	84,99	95,40	88,09	84,04
Kota Semarang	84,43	95,91	86,53	82,99
Kota Pekalongan	76,71	95,65	79,52	76,06
Kota Tegal	77,06	93,68	80,71	75,61

Sumber: <http://jateng.bps.go.id>, diolah

4.4 Perbandingan Regional Pembangunan Gender Ibukota Provinsi di Pulau Jawa

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dengan laki-laki. IPG diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dengan perempuan. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Indeks Pembangunan Gender Kota Semarang tahun 2023 sebesar 95,91 jika dibandingkan dengan ibukota provinsi lain yang ada di Pulau Jawa menduduki peringkat ketiga, setelah Kota Yogyakarta dengan Indeks Pembangunan Gender sebesar 99,04 poin dan Kodya Jakarta Pusat sebesar 97,60 poin. Peringkat keempat adalah Kota Surabaya dengan Indeks Pembangunan Gender sebesar 95,56 poin, disusul oleh Kota

Bandung dengan IPG 95,24 poin. Peringkat terakhir diduduki oleh Kota Serang dengan IPG sebesar 93,41 poin. Hal yang menarik dicermati dari gambar di bawah ini adalah, semua ibukota provinsi yang ada di Pulau Jawa memiliki IPG di atas 90 poin, ini menunjukkan pembangunan gender semua ibukota provinsi di Pulau Jawa sudah relatif setara dan termasuk kategori sangat tinggi.



Sumber: <http://bps.go.id>, diolah

Gambar 15 IPG Ibukota Provinsi di Pulau Jawa, 2023

BAB V

*CAPAIAN PEMBERDAYAAN GENDER
DI KOTA SEMARANG*

BAB V

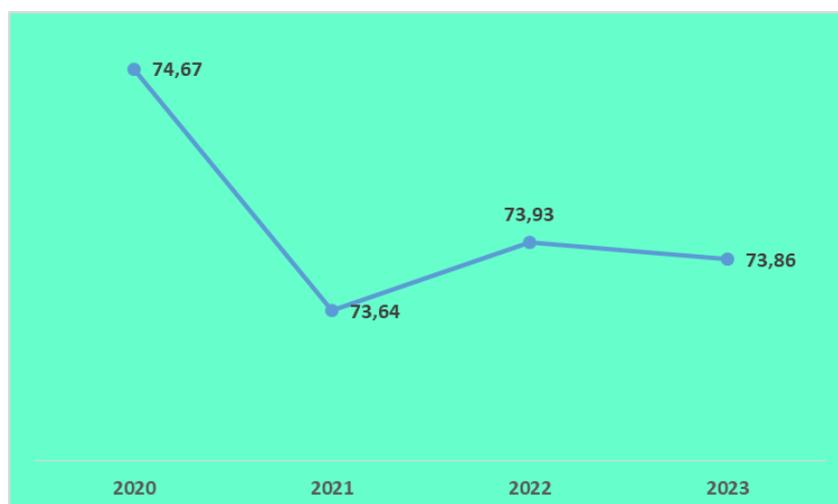
PEMBERDAYAAN GENDER DI KOTA SEMARANG

Pemberdayaan secara definisi merupakan proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan untuk memperbaiki situasi dan kondisi. Inti dari pemberdayaan ini adalah agar masyarakat memperoleh serta memaksimalkan daya, kekuatan, dan kemampuan. Beberapa indikator yang umumnya digunakan dalam mengukur pemberdayaan di antaranya: partisipasi dalam pendidikan, dalam dunia kerja, serta partisipasi dalam jabatan publik.

Dalam menilai sejauh mana pemberdayaan gender di Indonesia, digunakan sebuah indeks komposit, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Berbeda dengan IPG, IDG lebih fokus untuk melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi. Indikator ini merupakan adopsi dari *Gender Empowerment Measure* (GEM) yang disusun oleh UNDP.

5.1 Capaian Pemberdayaan Gender Kota Semarang

Pemberdayaan gender di Jawa Tengah pada periode 2020 – 2023 selalu mengalami fluktuasi, meskipun perubahan nilainya tidak terlalu signifikan, yakni antara 73 – 74 poin. Pada tahun 2023 IDG Kota Semarang berada pada level 73,86 poin, naik 0,07 poin dibandingkan tahun 2022.

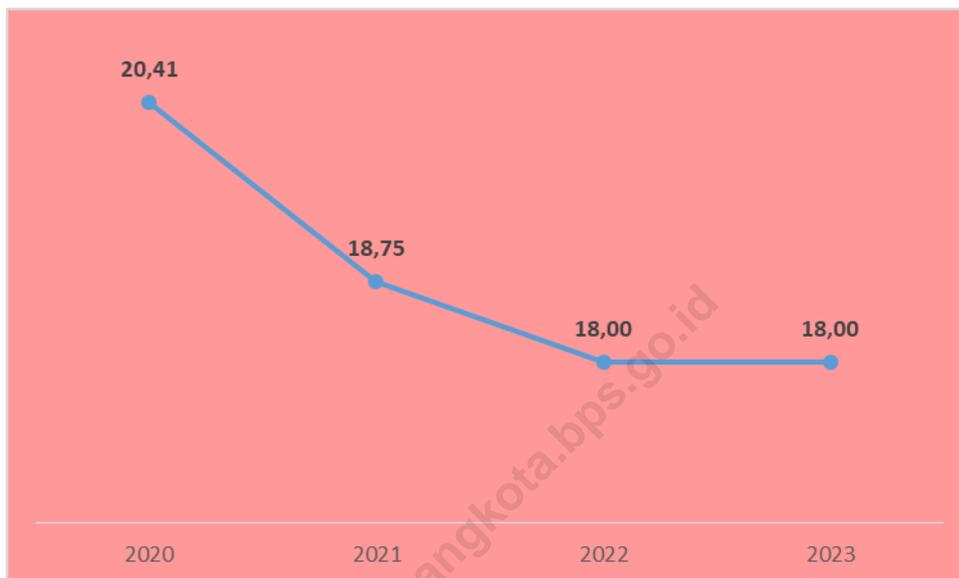


Sumber: <http://jateng.bps.go.id>, diolah

Gambar 16 IDG Kota Semarang, 2020-2023

5.2 Perkembangan Komponen Penyusun IDG Kota Semarang

Keberhasilan dalam bidang pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari perkembangan nilai IDG. Analisis yang lebih mendalam tentang pemberdayaan gender dapat dilihat dari perkembangan komponen penyusun IDG, yaitu keterlibatan di parlemen; persentase tenaga manajer, profesional, administrasi, dan teknisi; dan sumbangan dalam pendapatan kerja.



Sumber: <http://jateng.bps.go.id>, diolah

Gambar 17 Perkembangan Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kota Semarang, 2020-2023

Ruang berpolitik perempuan telah diatur oleh pemerintah guna mendorong peran aktif dan kontribusi para politisi perempuan dalam parlemen yang selama ini masih didominasi laki-laki. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017, disebutkan bahwa sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat dan bakal calon anggota DPR/DPRD lembaga legislatif. Hingga saat ini, target 30 persen agar anggota parlemen terisi oleh wakil perempuan belum tercapai. Keterlibatan perempuan di parlemen Kota Semarang pada periode 2020-2023 terus mengalami penurunan, mulai dari 20,41 persen pada tahun 2020. Pada tahun 2021 dan 2022 komponen keterlibatan perempuan di parlemen Kota Semarang kembali mengalami penurunan yaitu menjadi 18,75 persen dan 18 persen. Pada tahun 2023 komponen keterlibatan perempuan di parlemen Kota Semarang menunjukkan

kestabilan sebanyak 18 persen.

Kesetaraan gender sebagai salah satu tujuan pembangunan global membutuhkan aksi nyata dalam upaya meraihnya. Perempuan selama ini memiliki capaian lebih rendah dibanding laki-laki serta mengalami berbagai diskriminasi sebagai dampak budaya patriarki. Isu kesetaraan dan keadilan gender diharapkan dapat digaungkan lebih tegas ketika perempuan mampu berpartisipasi dan menduduki jabatan yang strategis dalam parlemen. Keterlibatan perempuan di lembaga eksekutif diharapkan mampu membawa peluang perubahan bagi pemberdayaan perempuan di Indonesia (BPS, 2018). Hal yang perlu dikaji lebih lanjut adalah apakah keterwakilan perempuan di parlemen berpengaruh signifikan terhadap disahkannya peraturan-peraturan yang memperjuangkan kesetaraan gender, baik di level nasional maupun daerah.



Sumber: <http://jateng.bps.go.id>, diolah

Gambar 18 Perkembangan Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional di Kota Semarang, 2020-2023

Tahun 2020 hingga tahun 2023, persentase perempuan sebagai tenaga profesional seperti manajer, profesional, administrasi, dan teknisi menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2020, komponen ini menunjukkan angka 51,15 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 51,30 persen. Namun pada tahun 2022 dan 2023, persentase perempuan sebagai tenaga profesional seperti manajer, profesional, administrasi, dan teknisi mengalami penurunan berturut-turut menjadi

49,78 persen dan 48,76 persen.

Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja Kota Semarang mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020-2022 komponen sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja mengalami peningkatan dari 37,13 persen menjadi 38,05 persen. Namun pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 37,93 persen.

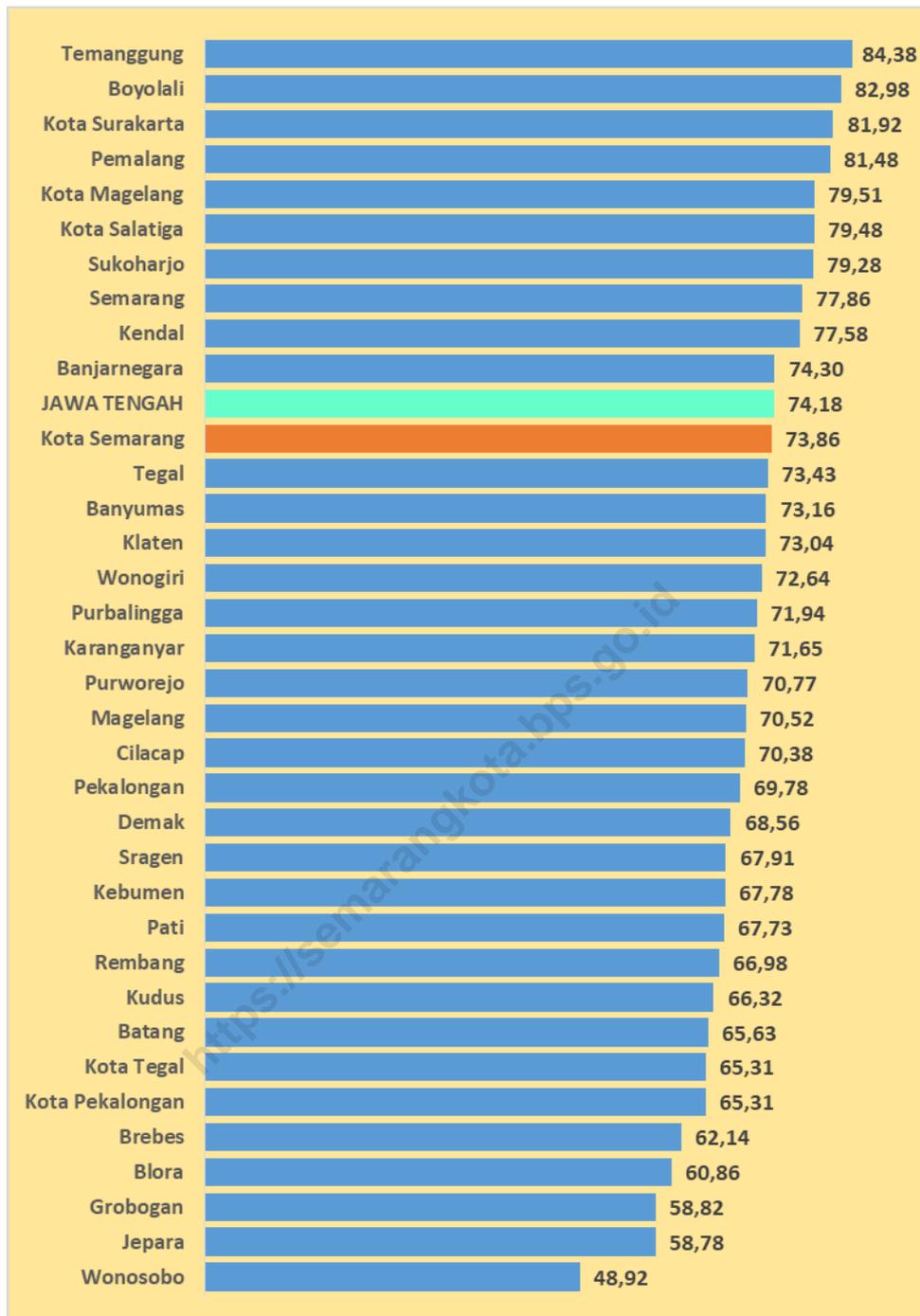


Sumber: <http://jateng.bps.go.id>, diolah

Gambar 19 Perkembangan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja di Kota Semarang, 2020-2023

5.3 Disparitas IDG Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

Pada tahun 2023, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Provinsi Jawa Tengah adalah 74,18 poin dengan peringkat secara nasional berada pada posisi tertinggi ketiga belas. Kabupaten Temanggung adalah daerah di Provinsi Jawa Tengah dengan nilai Indeks Pemberdayaan Gender terbesar (ranking tertinggi), yakni sebesar 84,38 poin pada tahun 2022. Indeks Pemberdayaan Gender terendah di Provinsi Jawa Tengah berada pada Kabupaten Wonosobo, yakni sebesar 48,92 poin pada tahun 2022. Indeks Pemberdayaan Gender Kota Semarang pada tahun 2023 sebesar 73,86 poin berada pada peringkat kesebelas jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah.



Sumber: <http://jateng.bps.go.id>, diolah

Gambar 20 IDG menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2023

5.4 Perbandingan Regional Pemberdayaan Gender Ibukota Provinsi di Pulau Jawa

Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Kota Semarang tahun 2023 sebesar 73,86 poin jika dibandingkan dengan ibukota provinsi lain yang ada di Pulau Jawa menduduki peringkat keempat, setelah Kota Surabaya dengan Indeks Pemberdayaan Gender sebesar 85,29 poin, Kodya Jakarta Pusat sebesar 79,02 poin, dan Kota Yogyakarta

sebesar 75,70 poin. Peringkat kelima adalah Kota Bandung dengan Indeks Pembangunan Gender sebesar 73,01 poin. Peringkat terakhir diduduki oleh Kota Serang dengan IPG sebesar 62,98 poin.



Sumber: <http://bps.go.id>, diolah

Gambar 21 IDG Ibukota Provinsi di Pulau Jawa, 2023

BAB VI

KESIMPULAN

BAB VI

KESIMPULAN

Gender bukan dimaknai sebagai perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan dalam arti biologis. Pemaknaan gender mengacu pada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam peran, perilaku, kegiatan serta atribut yang dikonstruksikan secara sosial. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk perempuan dan laki-laki dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan.

Dalam mengukur kesetaraan gender tersebut, ada beberapa indeks yang digunakan yaitu IPM, IPG, dan IDG. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran kualitas hidup manusia dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Ukuran tersebut kemudian digunakan untuk mengukur Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang difokuskan pada faktor ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di berbagai level. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi yaitu dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, kegiatan politik dengan indikator keterlibatan perempuan di parlemen, serta dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, dan teknis. Kesimpulannya, IDG digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Semarang tahun 2023 tercatat sebesar 95,91; meningkat 0,02 poin dibanding tahun 2022. Secara wilayah, IPG Kota Semarang lebih tinggi dari IPG Provinsi Jawa Tengah yaitu pada level 93,31. IPG tertinggi dicapai oleh Kabupaten Sukoharjo (97,32), sedangkan IPG terendah dicapai oleh Kabupaten Blora (85,68). Jika dibandingkan dengan ibukota provinsi lain di pulau Jawa, IPG Kota

Semarang berada pada urutan ketiga setelah Kota Yogyakarta (98,48) dan Kodya Jakarta Pusat (96,41).

Pemberdayaan gender di Kota Semarang pada tahun 2023 berada pada level 73,86; menurun 0,07 poin atau turun 0,09 persen dibanding IDG tahun 2022. Penurunan IDG pada tahun 2023 terutama terjadi karena penurunan komponen perempuan sebagai tenaga profesional dan komponen sumbangan dalam pendapatan kerja. Persentase keterlibatan perempuan di parlemen stabil di 18,00 pada tahun 2022 dan 2023, sedangkan persentase perempuan sebagai tenaga profesional turun dari 49,78 pada tahun 2022 menjadi 48,76 pada tahun 2023 dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja juga turun dari 38,05 pada tahun 2022 menjadi 37,93 pada tahun 2023.

Secara wilayah, IDG Kota Semarang pada tahun 2023 berada pada level 73,86; lebih rendah dari IDG Provinsi Jawa Tengah yaitu pada level 74,18. IDG tertinggi dicapai oleh Kabupaten Temanggung (84,38), sedangkan IDG terendah dicapai oleh Kabupaten Wonosobo (48,92). Jika dibandingkan dengan ibukota provinsi lain di pulau Jawa, IDG Kota Semarang berada pada urutan keempat setelah Kota Surabaya (85,29), Kodya Jakarta Pusat (79,02), dan Kota Yogyakarta (75,70).

DAFTAR PUSTAKA

<https://semarangkota.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

- Amartya Sen. 1989. *International Development Freedom: Third World*
- KPPPA. 2018. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2018*. Jakarta: KPPPA
- Michael P. Todaro, Stephen C. Smith. 2006. *Economic Development*. Jakarta: Erlangga
- Stephan Klasen, UNDP's Gender-related Measures: Some Conceptual Problems and Possible Solutions. *Journal of Human Development and Capabilities*, 2006, vol. 7, issue 2, 243-274
- Wisnujati, Nugrahini Susantinah. 2020. *Penyusunan Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Pembangunan Kabupaten Bojonegoro*. P-ISSN: 14121816, E-ISSN:2614-4549; Vol 20 No 2, Desember 2020
- Alfiana, Muhammad Arif Fahrudin dkk. 2015. *Dinamika Pembangunan Manusia Berbasis Gender di Indonesia*. Seminar Nasional Geografi UMS 2015
- Badan Pusat Statistik. 2021. *Angka Kesakitan*.
<https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/16> (1 Juli 2021)
- _____. 2019. *Publikasi Indeks Pembangunan Manusia 2018*. Jakarta: BPS RI
- _____. 2021. *Publikasi Indikator Pembangunan Manusia dan Gender Provinsi Riau. Riau 2020: BPS Provinsi Riau*
- _____. 2021. *Publikasi Analisis Pembangunan Manusia Berbasis Gender Provinsi Jawa Tengah 2020*. Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah
- _____. 2024. *Publikasi Analisis Pembangunan Manusia Berbasis Gender Provinsi Jawa Tengah 2023*. Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah
- _____. 2020. *Kajian Penghitungan Indeks Ketimpangan Gender*. Jakarta: BPS RI
- _____. 2024. *Publikasi Kota Semarang dalam Angka 2024*. Semarang: BPS Kota Semarang
- _____. 2021. *Publikasi Statistik Sosial dan Kependudukan Jawa Tengah Hasil Susenas 2020*. Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah
- _____. 2022. *Publikasi Statistik Sosial dan Kependudukan Jawa Tengah Hasil Susenas 2021*. Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah
- _____. 2023. *Publikasi Statistik Sosial dan Kependudukan Jawa Tengah Hasil Susenas 2022*. Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah

- _____. 2024. Publikasi Statistik Sosial dan Kependudukan Jawa Tengah Hasil Susenas 2023. Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah
- _____. 2021. Publikasi Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Tengah Agustus 2020. Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah
- _____. 2022. Publikasi Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Tengah Agustus 2021. Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah
- _____. 2023. Publikasi Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Tengah Agustus 2022. Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah
- _____. 2024. Publikasi Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Tengah Agustus 2023. Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah
- _____. 2023. Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Semarang 2023. Semarang: BPS Kota Semarang
- _____. 2024. Usia Harapan Hidup (UHH) Hasil Long Form SP2020 Menurut Jenis Kelamin (Tahun). <https://jateng.bps.go.id/indicator/40/2082/1/-ipg-usia-harapan-hidup-uhh-hasil-long-form-sp2020menurut-jenis-kelamin.html> (24 Juni 2024)
- _____. 2024. Harapan Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin. <https://jateng.bps.go.id/indicator/40/132/1/-ipg-angka-harapan-lama-sekolah-hls-menurut-jenis-kelamin.html> (24 Juni 2024)
- _____. 2024. Rata-rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin. <https://jateng.bps.go.id/indicator/40/134/1/-ipg-rata-rata-lama-sekolah-rls-menurut-jenis-kelamin.html> (24 Juni 2024)
- _____. 2024. Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan (PPP) Menurut Jenis Kelamin. <https://jateng.bps.go.id/indicator/40/135/1/-ipg-pengeluaran-per-kapita-yang-disesuaikan-ppp-menurut-jenis-kelamin.html> (24 Juni 2024)
- _____. 2024. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Hasil Long Form SP20220 Menurut Jenis Kelamin. <https://jateng.bps.go.id/indicator/40/2085/1/-ipg-indeks-pembangunan-manusia-ipm-hasil-long-form-sp2020-menurut-jenis-kelamin.html> (24 Juni 2024)
- _____. 2024. Indeks Pembangunan Gender (IPG). <https://jateng.bps.go.id/indicator/40/2086/1/-ipg-indeks-pembangunan-gender-ipg-hasil-long-form-sp2020.html> (24 Juni 2024)

- _____. 2024. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
<https://jateng.bps.go.id/indicator/40/164/1/-idg-indeks-pemberdayaan-gender-.html> (24 Juni 2024)
- _____. 2024. Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen.
<https://jateng.bps.go.id/indicator/40/163/1/-idg-keterlibatan-perempuan-di-parlemen.html> (24 Juni 2024)
- _____. 2024. Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Profesional.
<https://jateng.bps.go.id/indicator/40/165/1/-idg-perempuan-sebagai-tenaga-profesional.html> (24 Juni 2024)
- _____. 2024. Sumbangan Pendapatan Perempuan.
<https://jateng.bps.go.id/indicator/40/166/1/-idg-sumbangan-pendapatan-perempuan.html> (24 Juni 2024)

<https://semarangkota.bps.go.id>

ST 2023

SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA SEMARANG**

Jln. Inspeksi Kali Semarang no.1, Semarang, Jawa Tengah

Telp/ Fax 024-3546413

E-mail : bps3374@bps.go.id

Website : <http://semarangkota.bps.go.id>

